

**ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KOTA SEMARANG**

**(Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan  
Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang  
Tahun 2008-2010)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**LIYANA APRIYANTI  
NIM. C2B005180**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Liyana Apriyanti  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B005180  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ IESP  
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KOTA SEMARANG  
(Kasus Implementasi Program  
Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri  
Perkotaan Kelurahan Kemijen  
Kecamatan Semarang Timur Kota  
Semarang Tahun 2008-2010)**  
Dosen Pembimbing : Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP

Semarang, 1 Maret 2011

Dosen Pembimbing,

(Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP)  
NIP.196104161987101001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Liyana Apriyanti  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B005180  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ IESP  
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KOTA SEMARANG  
(Kasus Implementasi Program  
Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri  
Perkotaan Kelurahan Kemijen  
Kecamatan Semarang Timur Kota  
Semarang Tahun 2008-2010)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 1 Maret 2011**

Tim Penguji

1. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP (.....)
2. Dr. Syafrudin Budiningharto, SU (.....)
3. Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si (.....)

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Arifin S, Mcom,(Hons), Akt  
NIP. 196009 198703 1 023

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Liyana Apriyanti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 Maret 2011

Yang membuat pernyataan,

(Liyana Apriyanti)  
NIM : C2B005180

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *MOTTO*

- ❖ *Bahwasanya setiap kata adalah do'a, untuk itu berhati-hatilah dalam berkata*
- ❖ *Mungkin Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi yakinkanlah bahwa Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan*
- ❖ *Tuhan mempunyai rencana yang beda untuk hamba-Nya dan yakinkanlah bahwa Tuhan telah menyiapkan rencana indah untuk setiap hamba-Nya*

### *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk bapak dan ibuku tercinta yang telah mengorbankan segalanya, yang doanya tak pernah henti, yang keringatnya selalu tercurah, yang kesabarannya selalu mengalir, yang ikhlas dilakukan demi kebaikan dan kebahagiaan penulis.*

## **ABSTRACT**

*According to Nurkse, poverty leads to the vicious circle of poverty theory, to overcome poverty it is necessary to cut off the circle. One of the ways to cut off the circle according to the expert is giving capital loan. One of the activities done by PNPM Mandiri Perkotaan as a program to overcome poverty in the field of economy is to give capital loan for the poor who join KSM. This reseach focussed on periodic loan program PNPM Mandiri Perkotaan in the Kemijen village, East Semarang subdistrict from 2008 until 2010 observed from the point of view of KSM members upon the program and the difference of income, deposit, and investment of KSM members before and after the program.*

*The analysis used in this research is descriptive analysis and quantitative one. Descriptive analisis is used to describe the constant patterns of data so that the result can be estimated shortly and meaningfully. Quantitative analysis in the research uses Wilcoxon Sign Rank Test. That is used as comparative tes because the data observed come from the same respondents and they have something to do wiht the difference of observation time (before and after the program carried out).*

*Based on the results of descriptive analysis abot the point of view of KSM Members upon the periodical loan shows that they think that the term of the loan return is short (65,63%) and the ineterest is high (79,69%). 54,76% of them think that the loan is really helpful to add the capital, 52,38% respondent say that the loan hel the enterprise run smoothly, and 52,38% say that it can increase the income. That point of view shows that the periodical capital loan can help KSM members to develope their enterprises. The comparative test shows that the average income of KSM member per month after the program increase up to 18,41%, the deposits increases up to 53,91%, while the invesment increases up to 50,26%. It proves that when the periodical capital loan program is well-managed, it can cut off the vicious circle of poverty.*

*Keywords : periodical capital loan of PNPM Mandiri Perkotaan, income, deposit, investment, descriptive analysis, Wilcoxon sign rank test*

## ABSTRAK

Menurut Nurkse, kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan, untuk itu penanggulangan kemiskinan hendaknya mampu memutus lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara memutus lingkaran setan kemiskinan menurut para ahli adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha. Salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai program penanggulangan kemiskinan di bidang ekonomi adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha untuk warga miskin yang tergabung dalam KSM. Fokus penelitian ini adalah program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008 – 2010 ditinjau dari persepsi anggota KSM terhadap program serta perbedaan pendapatan usaha, tabungan, dan investasi usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat ditafsirkan secara singkat dan penuh makna. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan uji statistik pangkat tanda Wilcoxon. Uji pangkat tanda Wilcoxon digunakan sebagai uji beda dengan alasan data yang diteliti berasal dari sejumlah responden yang sama dan berkaitan dengan periode waktu pengamatan yang berbeda (sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir).

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tentang persepsi anggota KSM terhadap pinjaman bergulir menunjukkan bahwa mereka menganggap jangka waktu pengembalian pinjaman tidak lama (65,63 %) dan bunga pinjaman juga berat (79,69 %). Sebanyak 54,76 % berpendapat bahwa pinjaman bergulir dapat membantu modal usaha, 52,38 % responden berpendapat membantu kelancaran usaha dan 52,38 % responden berpendapat bahwa pinjaman dapat meningkatkan usahanya. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa pinjaman bergulir membantu anggota KSM dalam mengembangkan usaha mereka. Dari hasil analisis uji beda memperlihatkan bahwa pendapatan usaha anggota KSM rata-rata per bulan sesudah program mengalami perubahan yang meningkat sampai 18,41 %, tabungan anggota KSM rata-rata per bulan sesudah program mengalami perubahan yang meningkat sampai 53,91%, sedangkan investasi usaha anggota KSM rata-rata per bulan sesudah program mengalami perubahan yang meningkat sampai 50,26 %. Adanya peningkatan ini menunjukkan bahwa apabila program pinjaman bergulir dilaksanakan secara baik akan dapat memutus lingkaran setan kemiskinan.

Kata kunci : pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, pendapatan usaha, tabungan, investasi usaha, analisis deskriptif, uji pangkat tanda Wilcoxon

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA SEMARANG (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010). Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Ak, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, M.SP. selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Wali atas bimbingan dan pengarahannya.
4. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

5. BPS Propinsi Jawa Tengah, Bappeda Kota Semarang, Bapermasper dan KB Kota Semarang, Kantor Kecamatan Semarang Timur, Kantor Kelurahan Kemijen.
6. Pengurus BKM Kemijen Mandiri serta segenap responden atas kesediaannya dalam memberikan informasi.
7. Kedua orang tua, kakak dan kakak ipar atas kasih sayang dan tak hentinya memberi doa, nasehat, semangat, dan dukungan untuk menyelesaikan studi.
8. Mas Affandi atas segala dukungannya baik moril maupun materiil.
9. Teman-teman Antera semua atas bantuan dan doanya.
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku IESP 2005 (Puri, Mafla, Eka, Diana, Wawan, Yudha, Prima, Fifi, Qory, Esti, Ska, dkk), yang telah memberi dukungan baik moril maupun materiil.
11. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses pembuatan hingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 1 Maret 2011  
Penulis,

Liyana Apriyanti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	10
2.1.1 Beberapa Konsep Tentang Kemiskinan .....	10
2.1.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan .....	11
2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan .....	14
2.1.4 Penanggulangan Kemiskinan.....	16
2.1.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan .....	18
2.1.6 Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.....	21
2.1.7 Usaha Ekonomi Produktif .....	28
2.1.8 Dampak Pinjaman Dana .....	28
2.1.9 Pendapatan.....	29

2.1.10	Tabungan .....	31
2.1.11	Investasi.....	32
2.1.15	Penelitian Terdahulu .....	33
2.2	Kerangka Pemikiran .....	36
2.3	Hipotesis .....	37
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	38
3.2	Populasi dan Sampel.....	39
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	40
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	40
3.5	Metode Analisis .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	48
4.1.1	Deskripsi Kelurahan Kemijen.....	48
4.1.2	Deskripsi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kemijen.....	52
4.1.3	Deskripsi Responden Penerima Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kemijen .....	57
4.1.4	Deskripsi Variabel-Variabel Penelitian.....	70
4.2	Analisis Data .....	76
4.2.1	Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian....	77
4.2.2	Uji Normalitas Instrumen Penelitian.....	79
4.2.3	Analisis Deskriptif.....	80
4.2.4	Analisis Uji Pangkat Tanda Wilcoxon.....	85
4.3	Interpretasi Hasil .....	88
4.3.1	Persepsi Anggota KSM terhadap Program Pinjaman Bergulir.....	88
4.3.2	Perbedaan Pendapatan Usaha Anggota KSM Sebelum dan Sesudah Program Pinjaman Bergulir.....	89
4.3.3	Perbedaan Tabungan Anggota KSM Sebelum dan Sesudah Program Pinjaman Bergulir .....	90

4.3.4 Perbedaan Investasi Usaha Anggota KSM Sebelum dan Sesudah Program Pinjaman Bergulir.....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
5.1 Simpulan .....	92
5.2 Keterbatasan .....	93
5.3 Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Semarang Tahun 2002-2008 .....	5
Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Warga Miskin Menurut Kelurahan di Kecamatan Semarang Timur Tahun 2008 dan 2010 .....	6
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Kemijen Tahun 2010 Menurut Kelompok Usia.....	49
Tabel 4.2 Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Kemijen.....	50
Tabel 4.3 Bidang Pembangunan di Kelurahan Kemijen.....	50
Tabel 4.4 Identitas Responden Menurut Alamat .....	58
Tabel 4.5 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin.....	58
Tabel 4.6 Identitas Responden Menurut Umur .....	59
Tabel 4.7 Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan .....	59
Tabel 4.8 Identitas Responden Menurut Pekerjaan Pokok .....	60
Tabel 4.9 Identitas Responden Menurut Status Marital.....	61
Tabel 4.10 Identitas Responden Menurut Jumlah Anggota Keluarga .....	61
Tabel 4.11 Identitas Responden Menurut Tanggungan Keluarga .....	62
Tabel 4.12 Kondisi Rumah Responden Menurut Status Rumah .....	62
Tabel 4.13 Kondisi Rumah Responden Menurut Kondisi Lantai Rumah ....	63
Tabel 4.14 Kondisi Rumah Responden Menurut Jenis Dinding Rumah .....	63
Tabel 4.15 Kondisi Rumah Responden Menurut Jenis Bahan Bakar yang Digunakan.....	64
Tabel 4.16 Kondisi Rumah Responden Menurut Sumber Penerangan Rumah Tangga .....	64
Tabel 4.17 Kondisi Rumah Responden Menurut Sumber Air yang Digunakan	65

Tabel 4.18 Total Pengeluaran Keluarga Responden.....	65
Tabel 4.19 Total Pendapatan Keluarga Responden.....	66
Tabel 4.20 Karakteristik Responden Menurut Tahun Awal Pinjaman .....	67
Tabel 4.21 Karakteristik Responden Menurut Jenis Usaha Sampingan .....	67
Tabel 4.22 Karakteristik Responden Menurut Lama Usaha .....	68
Tabel 4.23 Karakteristik Responden Menurut Motif Mendirikan Usaha .....	68
Tabel 4.24 Karakteristik Responden Menurut Asal Modal Usaha Sebelum Pinjaman .....	69
Tabel 4.25 Karakteristik Responden Menurut Tenaga yang Dipekerjakan ..	70
Tabel 4.26 Pendapatan Usaha Responden Anggota KSM Ekonomi Produktif di Kelurahan Kemijen.....	72
Tabel 4.27 Kenaikan Pendapatan Usaha Responden Anggota KSM Ekonomi Produktif di Kelurahan Kemijen (Dalam Rupiah) .....	73
Tabel 4.28 Tabungan Responden Anggota KSM Ekonomi Produktif di Kelurahan Kemijen.....	74
Tabel 4.29 Kenaikan Tabungan Responden Anggota KSM Ekonomi Produktif di Kelurahan Kemijen (Dalam Rupiah).....	75
Tabel 4.30 Investasi Usaha Responden Anggota KSM Ekonomi Produktif di Kelurahan Kemijen.....	75
Tabel 4.31 Kenaikan Investasi Responden Anggota KSM Ekonomi Produktif di Kelurahan Kemijen (Dalam Rupiah).....	76
Tabel 4.32 Hasil Uji Validitas Instrumen Pinjaman Bergulir .....	77
Tabel 4.33 Hasil Uji Validitas Instrumen Pendapatan Usaha .....	78
Tabel 4.34 Hasil Uji Validitas Instrumen Tabungan .....	78
Tabel 4.35 Hasil Uji Validitas Instrumen Investasi Usaha .....	79
Tabel 4.36 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	79

Tabel 4.37 Pencairan Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kemijen Tahun 2008-2010 .....	80
Tabel 4.38 Tingkat Pengembalian Pinjaman Bergulir di BKM Kemijen Mandiri Tahun 2008 – 2010 .....	81
Tabel 4.39 Jumlah Pinjaman yang Diterima Oleh Responden Anggota KSM Ekonomi Produktif di Kelurahan Kemijen.....	82
Tabel 4.40 Pendapat Responden Tentang Waktu Pengembalian Pinjaman Bergulir .....	83
Tabel 4.41 Pendapat Responden Tentang Bunga Pinjaman Bergulir .....	83
Tabel 4.42 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Pinjaman Bergulir Terhadap Peningkatan Modal .....	84
Tabel 4.43 Pendapat Responden Tentang Manfaat Pinjaman Bergulir Dalam Kelancaran Usaha.....	85
Tabel 4.44 Pendapat Responden Tentang Manfaat Pinjaman Bergulir Dalam Peningkatan Usaha .....	85
Tabel 4.45 Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Pendapatan Usaha Sebelum dan Sesudah Program .....	86
Tabel 4.46 Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Tabungan Sebelum dan Sesudah Program .....	87
Tabel 4.47 Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Investasi Usaha Sebelum dan Sesudah Program.....	87

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan ( <i>The Vicious Circle of Poverty</i> ).....	12
Gambar 2.2 Tahapan Pemberdayaan .....	19
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kuesioner Bagi Responden .....	98
Lampiran B Data Identitas Responden .....	105
Lampiran C Data Kondisi Rumah Respoden .....	107
Lampiran D Data Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga Responden .....	109
Lampiran E Data Usaha Responden .....	110
Lampiran F Sebaran Data Untuk Analisis .....	112
Lampiran G Data Mentah Dampak Program Pinjaman Bergulir .....	114
Lampiran H Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian.....	116
Lampiran I Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	119
Lampiran J Hasil Uji Normalitas Instrumen Penelitian.....	121
Lampiran K Hasil Uji Pangkat Tanda Wilcoxon .....	122
Lampiran L Peta Kelurahan Kemijen .....	125

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, target penurunan kemiskinan pada tahun 2009 ditetapkan sebesar 8,2 % dari total jumlah penduduk Indonesia. Sejalan dengan itulah salah satu program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu adalah penghapusan kemiskinan (Bappeda Kota Semarang, 2008).

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah. Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan

demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat (teori Nurkse) dan telah dibuktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia (Jaka Sumanta, 2005).

Lingkaran setan kemiskinan ini disebabkan oleh keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terciptanya tingkat pembentukan modal. Sedangkan pembentukan modal diperoleh dari tingkat tabungan. Ada dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran dan permintaan modal. *Pertama*, penawaran modal. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh produktivitas rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Pada akhirnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Efek dari pembentukan modal rendah adalah negara menghadapi kekurangan barang modal, implikasinya tingkat produktivitas tetap rendah. *Kedua*, permintaan modal. Di negara miskin keinginan untuk menanamkan modal rendah. Hal ini lebih disebabkan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Di samping itu, pendapatan masyarakat juga rendah yang diakibatkan produktivitas mereka rendah (Agus Suman, 2006).

Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000) mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Pernyataan "*a poor country is poor because it is poor*" sungguh sangat menyedihkan. Sebuah pernyataan yang tidak berujung pangkal bahwa negara miskin karena tidak punya apa-apa, dan tidak punya apa-apa menyebabkan negara menderita kemiskinan. Ada beberapa solusi yang

ditawarkan oleh para sarjana untuk memotong lingkaran setan kemiskinan di Indonesia, yaitu (Agus Suman, 2006) :

1. Menggali potensi kekayaan alam.
2. Meningkatkan produktivitas kerja.
3. Menggiatkan masyarakat untuk menabung.
4. Memberikan pinjaman untuk modal usaha.

Memotong lingkaran kemiskinan dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha pernah dilakukan oleh Muhammad Yunus, peraih nobel perdamaian asal Bangladesh. Beliau dikenal sebagai tokoh yang membidangi lahirnya *Grameen Bank* (bank untuk orang miskin). Menurut pandangan beliau, memahami masalah kemiskinan seharusnya dari pihak yang mengalami masalah. Banyak pihak yang salah persepsi mengenai kemiskinan, yaitu kesejahteraan erat kaitannya dengan keterampilan yang dimilikinya yang diartikan, kesejahteraan hidup tidak bisa terwujud jika seseorang tidak memiliki keterampilan. Atas dasar ini, setiap pemberi dana atau modal tidak akan memberikan pinjaman modal kepada seseorang yang tidak terampil, kecuali orang tersebut diberi pelatihan terlebih dahulu. Bagi Yunus, konsep ini tidak beralasan, karena yang dibutuhkan oleh orang yang bermasalah adalah modal awal untuk berusaha dan bukan keterampilan. Dia menyakini, masing-masing individu mempunyai keterampilan bawaan sejak lahir. Keterampilan akan muncul dengan sendirinya, melalui adanya modal dan usaha yang dilakukan untuk bangkit dari keterpurukan (Muhammad Ali, 2009).

Salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah PNPM Mandiri Perkotaan. Dulu program ini bernama P2KP dan berganti nama menjadi PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2008. Penganggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa yang tergabung dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Program pinjaman bergulir ini serupa dengan program *Grameen Bank* yang merupakan program andalan Yunus yakni tidak menerapkan agunan.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia jelas tidak hanya menjadi milik perdesaan (petani, buruh tani, buruh nelayan, dan sebagainya) tetapi juga merupakan masalah perkotaan. Parsudi Suparlan (1984) mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di perdesaan.

Kemiskinan kota sebagai bagian dari kemiskinan nasional di Indonesia juga menjadi masalah yang cukup akut untuk ditangani. Sebagai warisan dan historis yang sudah berabad-abad, sejak munculnya kota itu sendiri, kaum papa perkotaan menjadi sebuah fenomena masalah sosial yang memprihatinkan, dengan

tingkat penanggulangan yang lebih memprihatinkan, seolah-olah kemiskinan itu sendiri bersifat abadi, lestari dan tidak bisa dirubah lewat aksi maupun reformasi apapun. Kota-kota di Indonesia yang sekilas kelihatan sebagai simbol kemajuan dan budaya yang lebih maju dan seharusnya demikian, ternyata masih dipenuhi oleh problem kemiskinan dengan segala masalah sosial yang disebabkan atau berdampingan dengan masalah sosial lainnya (Marliati, 2005).

Dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, Kota Semarang sebagai Ibukota Propinsi Jawa Tengah menghadapi persoalan yang cukup kompleks berkenaan dengan kemiskinan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penduduk miskin Kota Semarang lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Semarang Tahun 2002-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga Miskin</b>
2002	44.013 KK
2003	44.358 KK
2004	51.604 KK
2005	69.646 KK
2006	82.482 KK
2007	82.537 KK
2008	82.537 KK

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2008

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial penduduk di Kota Semarang merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat (Bappeda Kota Semarang, 2008).

Kota Semarang telah melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan sejak namanya masih P2KP yaitu sejak tahun 1999. Dari 16 kecamatan yang ada di kota Semarang, hanya 10 kecamatan yang menjadi lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2007. Kecamatan Semarang Timur merupakan salah satu kecamatan di kota Semarang yang telah melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan sejak awal berdirinya yaitu tahun 2007.

Daerah penelitian ini adalah salah satu kelurahan di kecamatan Semarang Timur yang memiliki jumlah keluarga miskin paling besar. Menurut salah satu pengelola PNPM Mandiri Perkotaan di kecamatan Semarang Timur, Ibu Endang (wawancara di kantor kecamatan Semarang Timur, 19 Juli 2010), kelurahan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah kelurahan Kemijen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Data Warga Miskin Menurut Kelurahan**  
**di Kecamatan Semarang Timur Tahun 2008 dan 2010**

No	Kelurahan	2008		2010	
		KK	Warga	KK	Warga
1.	Kemijen	2.120	7.263	1.698	5.761
2.	Rejomulyo	573	1.889	450	1.594
3.	Mlatibaru	1.002	3.127	759	2.613
4.	Kebonagung	411	1.626	328	1.207
5.	Mlatiharjo	682	2.316	490	1.701
6.	Bugangan	1.078	3.388	546	1.760
7.	Sarirejo	810	2.938	564	2.020
8.	Rejosari	1.938	6.842	1317	4.668
9.	Karangturi	282	1.133	212	749
10.	Karang Tempel	114	490	102	419
<b>Jumlah</b>		<b>9.010</b>	<b>31.012</b>	<b>6.466</b>	<b>22.492</b>

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2010

Dari alasan tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari tahu sejauh mana dampak program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di perkotaan (Studi Kasus di Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penanggulangan kemiskinan hendaknya mampu memutus lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara memutus lingkaran setan kemiskinan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha. Hal ini karena orang miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif bisa dipastikan skala usahanya adalah kecil atau mikro. Menurut Bambang Ismawan (2003), bagi pengusaha mikro, persoalan permodalan (aksesibilitas terhadap modal) ternyata merupakan masalah utama. Oleh karena itu pemberian permodalan berupa kredit perlu diberikan. PNPM Mandiri Perkotaan melalui salah satu kegiatannya di bidang ekonomi adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha untuk warga miskin yang tergabung dalam KSM.

Pemberian kredit pada orang miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif adalah penting untuk meningkatkan pendapatannya yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan membawa dampak positif dalam meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasaran program yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga pada akhirnya nanti. Berdasar pada latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi anggota KSM terhadap program pinjaman bergulir ?
2. Apakah ada perbedaan pendapatan usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir ?
3. Apakah ada perbedaan tabungan anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir ?
4. Apakah ada perbedaan investasi usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang :

1. Persepsi anggota KSM terhadap program pinjaman bergulir.
2. Perbedaan pendapatan usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir.
3. Perbedaan tabungan anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir.
4. Perbedaan investasi usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di kota Semarang
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada tema yang sama.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan laporan hasil penelitian sebagai berikut:

1. BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Bab ini juga menguraikan tujuan dan kegunaan baik untuk penulis maupun pihak lain serta menguraikan tentang sistematika penulisan.
2. BAB II menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan, selain itu juga terdapat kerangka pemikiran dari skripsi ini.
3. BAB III menguraikan metode penelitian meliputi definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.
4. BAB IV menguraikan hasil dan analisis yang terdiri dari deskripsi objek penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian Kelurahan Kemijen Kota Semarang, analisis data, dan pembahasan.
5. BAB V Menguraikan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan masalah penelitian

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Beberapa Konsep Tentang Kemiskinan**

Kemiskinan memiliki sifat plural sehingga kemiskinan menunjukkan adanya sekelompok orang yang serba kekurangan. Masyarakat subsisten yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan tapi rendah, bisa jadi tidak merasa miskin karena mereka merasa sudah terpenuhi kebutuhannya. Sebaliknya penduduk urban yang berpenghasilan sedang, mungkin merasa selalu kekurangan karena gaya hidup hedonis yang mereka jalani, atau lingkungan budaya tidak sehat yang mereka hadapi (misalnya seperti perangkap narkoba ataupun judi). Dalam hal ini meski kelihatannya mereka berkecukupan, namun apabila selalu merasa kekurangan, mereka bisa dikatakan miskin (Sulistiyanti, 2009).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan (*poverty line*) makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang / jasa lainnya. Garis kemiskinan ini memiliki kesamaan dengan garis kemiskinan menurut Bank Dunia yaitu diukur menurut pendapatan seseorang.

Sedangkan BKKBN menggunakan satuan rumah tangga untuk mengukur tingkat kemiskinan. Kemiskinan berada pada keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) yang ditandai oleh kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan non ekonomi. Di samping merujuk kepada individu dan rumah tangga penduduk miskin, ukuran kemiskinan juga dengan pendekatan melalui pengamatan daerah miskin. Terdapat hubungan yang kuat antara wilayah miskin dengan penduduk miskin, sehingga dengan mengetahui wilayah miskin dapat diharapkan ditemui mayoritas penduduk miskin.

Bappenas (2004), dalam Diah, 2007 mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

### **2.1.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan**

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000) sebagai berikut:

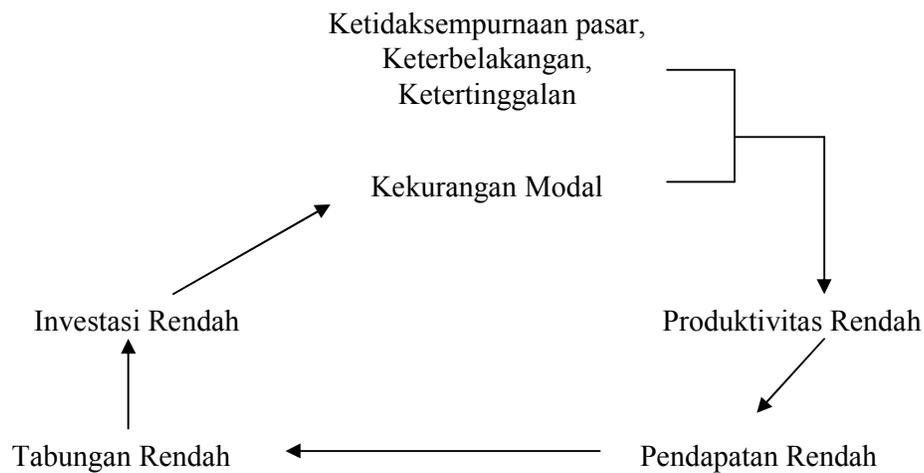
1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah;

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah;
3. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) lihat Gambar 2.1. Adanya keterbelakangan, ketidak-sempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000) yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*)

**Gambar 2.1**

**Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)**



**Sumber: Nurkse (1953) dalam Mudrajad Kuncoro, 2000**

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin” (*A country is poor because it is poor*). Menurut pendapatnya, inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai tingkat pembangunan yang pesat, yaitu dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal.

Dari segi penawaran modal lingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan secara berikut. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah. Keadaan yang terakhir ini selanjutnya akan dapat menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitas akan tetap rendah. Dari segi permintaan modal, corak lingkaran setan kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda. Di negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar

untuk berbagi jenis barang terbatas, dan hal yang belakangan disebutkan ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Sedangkan pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah yang diwujudkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal.

Di sisi lain Nurkse menyatakan bahwa peningkatan pembentukan modal bukan saja dibatasi oleh lingkaran perangkap kemiskinan seperti yang dijelaskan di atas, tetapi juga oleh adanya *international demonstration effect*. Yang dimaksudkan dengan ini adalah kecenderungan untuk mencontoh gaya konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih maju (Agus Suman, 2006).

### **2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan**

Tidak terlalu sulit menentukan faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit untuk menentukan mana yang merupakan penyebab sebenarnya atau utama, atau faktor-faktor mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Jika diuraikan satu persatu, jumlah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan cukup banyak. Mulai dari tingkat laju pertumbuhan output atau produktivitas, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat investasi, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultur budaya atau tradisi, bencana alam hingga peperangan, politik dan lain-lain (Tulus TH Tambunan, 2001).

Menurut Lembaga Penelitian SMERU, 2001, penyebab dasar kemiskinan antara lain:

- Kegagalan kepemilikan, terutama tanah dan modal
- Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana, dan prasarana
- Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor
- Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung
- Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern)
- Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat
- Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungan
- Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*)
- Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan

Menurut Bank Dunia (2003), dalam Diah (2007), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya

hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu (Chriswardani, 2005) :

- a. *Natural assets*: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
- b. *Human assets*: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
- c. *Physical assets*: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
- d. *Financial assets*: berupa tabungan (*saving*), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
- e. *Social assets*: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan *bargaining position* dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

#### **2.1.4 Penanggulangan Kemiskinan**

Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun di pemerintah pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin

disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004). Otonomi daerah memungkinkan peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa.

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan dan diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah yang terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi.

Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain : (1) masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, (2) kebijakan yang bersifat sentralistik, (3) lebih bersifat karikatif daripada transformatif, (4) memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, (5) orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat daripada produktivitas yang berkelanjutan, serta (6) cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada. Karena beragamnya sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar

persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun tak langsung (Bappenas, 2008).

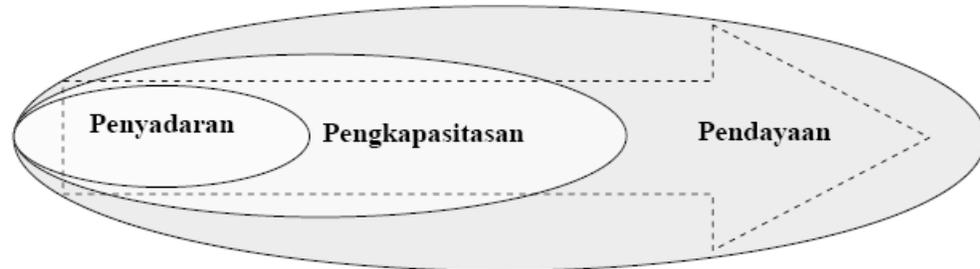
Kebijakan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1996) digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu (1) kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, (2) kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan (3) kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus.

#### **2.1.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya.

Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

**Gambar 2.2**  
**Tahapan Pemberdayaan**



Sumber : Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, "Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat", 2007

Dalam tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Di samping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.

Tahap pengkapisitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola paluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Selain memampukan masyarakat

miskin baik secara individu maupun kelompok, proses memampukan juga menyangkut organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan organisasi melalui restrukturisasi organisasi pelaksana sedangkan pengkapasitasan sistem nilai terkait dengan "aturan main" yang akan digunakan dalam mengelola peluang.

Pada tahap pendayaan, masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.

Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat *bottom up* yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Tahapan selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera. Dalam kata mandiri telah

terkandung pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Dalam pemandirian masyarakat miskin hendaknya tidak mengabaikan potensi dan kapasitas yang tersisa dalam diri maupun kelompoknya serta menghindarkan diri dari budaya cepat puas dan merasa cukup. Dalam pemandirian masyarakat miskin diajak untuk mengembangkan jejaring komunikasi sehingga mereka bisa menambah wawasan dan selalu diingatkan untuk memiliki pikiran yang maju berwawasan jauh ke depan untuk menjangkau kondisi yang lebih baik.

## **2.1.6 Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan**

### **2.1.6.1 Latar Belakang dan Tujuan Pinjaman Bergulir**

Penganggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman bergulir di P2KP-1, P2KP-2 dan P2KP-3 diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir di awal program kinerjanya sangat buruk. Namun dengan pemberian Panduan Operasional serta petunjuk pembukuan untuk UPK,

kinerja kegiatan pinjaman bergulir semakin membaik. Berbagai kesuksesan serta kegagalan kegiatan pinjaman bergulir di masa lalu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kelanjutan kegiatan pinjaman bergulir melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Beberapa pertimbangan dalam melanjutkan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan antara lain :

- a. Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin meningkatkan pendapatan dan kekayaannya
- b. Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapat akses ke jasa layanan keuangan formal. (sumber Johnston dan Holloch)
- c. Pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan
- d. Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan masyarakat masih tinggi
- e. Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi

ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan.

PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK.

#### **2.1.6.2 Sasaran, Pendekatan, Prinsip, dan Strategi Pinjaman Bergulir**

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2. Indikator tercapainya sasaran tersebut meliputi:

- a. Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam Daftar PS2.
- b. Minimum 30% peminjam adalah perempuan
- c. Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang.

- d. Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun melalui dana hasil *chanelling* dan kebijakan pinjaman yang jelas.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman masyarakat miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan lain melalui:

- a. Kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan ditingkat kelurahan, dikelola secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi masyarakat miskin.
- b. Transparansi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring partisipatif oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat .
- c. Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat bunganya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin.
- d. Menggunakan sistem tanggung renteng kelompok sebagai alat kontrol pengelola (UPK) maupun kelompok peminjam (KSM)
- e. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan ekonomi rumah tangga, kewirausahaan dan pembukuan sederhana.

Beberapa prinsip dasar dalam pemberian pinjaman bergulir yang perlu mendapat perhatian dari LKM / UPK antara lain adalah:

- a. Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan/desa sasaran dan bukan milik perorangan;

- b. Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan
- c. Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya;
- d. Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara LKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yang bertanggungjawab langsung kepada LKM;
- e. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditetapkan
- f. Manajer dan Petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan;
- g. UPK telah mempunyai sistim pembukuan yang standar dan sistim pelaporan keuangan yang memadai;
- h. UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM melalui Pengawas UPK maupun konsultan pelaksana (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek.

Kelanjutan pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan strategi di masing-masing tataran antara lain :

- a. Memprioritaskan pada meningkatkan kemampuan institusi yang sudah ada berkelanjan, daripada memperbanyak institusi ke seluruh kelurahan
- b. Menunda pembentukan UPK baru hingga kebijakan dan prosedur lengkap dan fasilitator telah siap
- c. Membuat sistem penjenjangan sederhana terhadap UPK berdasarkan kinerja keuangan, manajemen, kejujuran, dan kinerja sosial untuk membedakan UPK yang kinerjanya bagus dan yang buruk.
- d. Menetapkan kriteria untuk kinerja memuaskan dan kinerja minimum yang transparan dan mudah diukur oleh UPK, PMU dan PNPM Mandiri Perkotaan. Indikator kinerja memuaskan dan indikator kinerja minimum
- e. Menunda penambahan dana apabila kegiatan operasional UPK tidak mencapai kriteria minimum, dan menutup UPK yang gagal mencapai kriteria minimum dalam waktu satu tahun setelah penundaan.
- f. Membuat peringatan akan menutup UPK yang kinerjanya tidak memuaskan. Memperbaiki dan melaksanakan strategi untuk secara agresif menagih peminjam yang menunggak.
- g. Mengubah orientasi Manajemen Keuangan ke pengelolaan Kredit Mikro dan menyesuaikan struktur tim agar mampu mendisain pinjaman mikro, menyusun dan melaksanakan program pelatihannya, meningkatkan kemampuan dan monitoring fasilitator dalam bidang pinjaman bergulir.
- h. Struktur organisasi UPK secara jelas dan tegas terpisah baik operasional maupun keuangannya dari LKM, dan beroperasi menurut prinsip usaha yang seimbang dengan misi sosialnya.

- i. LKM membentuk Pengawas yang bertugas mengawasi dan mendukung UPK dalam promosi dan penagihan tunggakan pinjaman serta memastikan bahwa semua ketentuan telah dipatuhi UPK. Pengawas terdiri dari 2-3 orang yang mengandung unsur pria dan wanita.
- j. LKM harus membuat/mengubah Anggaran Dasarnya yang secara jelas mengatur tentang tujuan, tugas, tanggung jawab serta hasil yang diharapkan dari Pengawas dan UPK.
- k. LKM membuat pernyataan khusus bahwa BLM yang dialokasikan untuk Pinjaman Bergulir adalah menjadi modal lembaga UPK dan digunakan hanya untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan Pinjaman Bergulir saja. Penggunaan diluar kegiatan Pinjaman Bergulir harus dengan persetujuan dari KMP.
- l. Pendapatan UPK tidak boleh untuk membiayai kegiatan-kegiatan diluar Pinjaman Bergulir. Pendapatan UPK hanya untuk membayar insentif pegawai dan biaya operasional UPK.
- m. Unit Pengelola Keuangan (UPK) perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelatihannya. Fasilitator di bidang kredit mikro perlu mengubah fokus pelatihan dari pembukuan ke pelatihan dasar perkreditan, antara lain; pengenalan nasabah, analisis pinjaman, teknik penagihan, cash flow sederhana, laporan kinerja keuangan dan pembinaan. Modul pelatihan perlu ditambah sesuai dengan penambahan materi baru dan revisi materi yang ada.
- n. LKM harus menetapkan besarnya jasa pinjaman yang berfokus pada keberlanjutan. Jasa pinjaman harus dapat menutup semua biaya, yang antara

lain terdiri dari : *Cost of Fund* (biaya dana), Biaya operasional, Cadangan Risiko Pinjaman, Inflasi serta untuk Laba yang diinginkan.

### **2.1.7 Usaha Ekonomi Produktif**

Menurut Gunawan (1997), yang dimaksud dengan usaha ekonomi produktif adalah kegiatan usaha yang dikelola sendiri oleh anggota dan kelompok sehingga dapat menguntungkan, berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, unit usaha ekonomi produktif ini berkisar pada pengolahan, pemrosesan produk dan pemasaran produk. Karena modal usaha yang dimiliki relatif kecil, maka unit usahanyapun berada dalam skala yang kecil pula.

Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan dalam usaha ekonomi produktif, misalnya: candak kulak, industri kecil/ rumah tangga, pengembangan jasa pelayanan, perdagangan, dan usaha ekonomi produktif lainnya. Namun demikian, unit usaha ini tetap harus memiliki manajemen pemasaran yang baik agar usaha yang dilakukan dapat berkembang secara optimal.

### **2.1.8 Dampak Pinjaman Dana**

Variabel yang diukur dalam mendeteksi dampak pinjaman dana dapat dibagi dalam 3 tataran (Akatiga dan Yayasan Peramu, 2001 dalam Piet Boediono, 2005) yaitu:

1. Dampak di tataran pendapatan rumah tangga
  - a. Peningkatan pendapatan rumah tangga
  - b. Diversifikasi sumber-sumber pendapatan rumah tangga
  - c. Peningkatan aset yang dimiliki oleh rumah tangga, seperti perbaikan rumah, peningkatan/ penambahan peralatan rumah tangga dan alat

transportasi, peningkatan aset tetap usaha , peningkatan pengeluaran untuk pendidikan anak, peningkatan pengeluaran untuk makanan

2. Dampak di tataran usaha
  - a. Peningkatan pendapatan usaha
  - b. Peningkatan aset tetap
  - c. Peningkatan buruh baik yang diupah maupun yang tidak diupah
  - d. Pengembangan hubungan-hubungan bisnis pemilik usaha
  - e. Tingkat kemampuan yang lebih tinggi untuk masuk ke dalam sistem pajak
3. Dampak di tataran individu
  - a. Peningkatan kontrol klien terhadap sumber daya dan pendapatan di dalam portofolio ekonomi rumah tangga
  - b. Peningkatan harga diri dan respek dari orang lain
  - c. Peningkatan tabungan individu
  - d. Perubahan sikap dan pasrah menerima masa depan ke arah perilaku yang lebih proaktif dan peningkatan percaya diri
  - e. Perencanaan masa depan yang lebih baik, termasuk rencana jangka panjang untuk usahanya

### **2.1.9 Pendapatan**

#### **a. Pengertian Pendapatan**

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan tentang definisi pendapatan, yaitu: pendapatan adalah hasil berupa uang / jasa manusia bebas (Winardi, 1986). Sedangkan Sumitro (1978) mengartikan pendapatan sebagai setiap tambahan ekonomis yang diterima / diperoleh dari suatu usaha yang dapat dicapai untuk

menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Hadibroto (1982) memberikan definisi pendapatan sebagai hasil yang diperoleh dengan penjualan barang / jasa dan jumlahnya diukur dengan pembebanan yang dilakukan atas pembelian, klien / penyewa barang / jasa yang diserahkan kepada mereka (dalam Dwi, 2006).

#### **b. Jenis-jenis Pendapatan**

Pendapatan dalam masyarakat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu (Herawati, 1998) :

- 1) Pendapatan pokok, yaitu pendapatan yang diperoleh dari upah sebagai kerja pokok
- 2) Pendapatan tambahan, yaitu pendapatan yang diperoleh di luar pendapatan pokok
- 3) Pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang diperoleh selain pendapatan

#### **c. Sumber Pendapatan**

Seorang individu dapat memperoleh pendapatan dengan jalan bekerja maupun dengan harta benda yang dimilikinya, misalnya tanah, mesin, rumah atau yang lazim disebut dengan modal, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh pendapatan identik dengan menjual barang / jasa.

Adapun sumber-sumber pendapatan bila dilihat dapat diketahui berasal dari berbagai sumber. Hal ini seperti dijelaskan dalam Undang-undang Pajak Pendapatan pasal 22 tentang pengertian pendapatan, yaitu jumlah uang atau nilai uang yang selama tahun takwim diperoleh seseorang sebagai hasil dari uang dan tenaga, barang tak bergerak, harta bergerak, dan hak atas bayaran berkala (Sumitro, 1978 dalam Dwi, 2006).

Jadi kaitannya dengan tingkat pendapatan di dalam penelitian ini adalah lebih berfokus pada sumber pendapatan keluarga dari hasil usaha dan tenaga, yaitu dengan menjalankan usaha ekonomi produktif.

#### **2.1.10 Tabungan**

Menabung adalah salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan setiap orang, karena hasil tabungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan usaha menjadi lebih besar daripada sebelumnya atau dapat digunakan untuk menanggulangi berbagai kebutuhan yang mendesak. Tabungan yang dilakukan perseorangan bukan hanya bermanfaat bagi penabung itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi negara dan masyarakat, karena tabungan tersebut dapat dijadikan modal usaha dan investasi pinjaman oleh orang lain.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1986) dalam Maman (2007), tabungan merupakan sebagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi atau tabungan sama dengan pendapatan dikurangi dengan konsumsi. Penelitian empirik menunjukkan bahwa orang kaya menabung lebih banyak daripada orang miskin. Pengertian lebih banyak di sini bukan hanya dalam jumlah nominal, tetapi juga dalam bentuk persentase dari seluruh pendapatannya. Orang yang sangat miskin sangat jelas tidak akan mampu menabung sama sekali dan bahkan mungkin akan membelanjakan uang yang lebih banyak daripada pendapatannya. Untuk menutupi seluruh kebutuhan hidupnya mereka akan menggunakan tabungan yang sudah ada sebelumnya atau mengutang.

### **2.1.11 Investasi**

Dalam Sadono (1999), disebutkan definisi investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Lebih lanjut Sadono (1999), menjelaskan yang digolongkan sebagai investasi melalui pembelanjaan sebagai berikut:

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan
2. Pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional

Investasi menurut Mulyadi (1993) adalah pengakaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Dana yang sudah ditanamkan untuk penggantian atau penambahan peralatan suatu perusahaan akan terikat dalam jangka waktu yang cukup panjang sehingga perputaran dana tersebut untuk kembali menjadi uang tunai tidak dapat terjadi dalam waktu singkat. Sekali investasi diputuskan maka perusahaan akan terikat pada jalan panjang di masa yang akan datang yang sudah dipilih.

### 2.1.15 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Alat Analisis	Hasil
1.	Peran Dana Kukesra Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Kelompok UPPKS di Desa Tawang Sari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, Ning Handayani, 2004	<p>1. Untuk mendapatkan gambaran deskriptif tentang pemanfaatan dana Kukesra oleh para anggota kelompok UPPKS</p> <p>2. Untuk mengetahui pengaruh dana Kukesra, modal sendiri, pengalaman usaha, dan tenaga kerja terhadap pendapatan usaha masing-masing anggota kelompok UPPKS</p>	Analisis data menggunakan regresi berganda dengan variabel dependen pendapatan usaha, sedangkan variabel independennya adalah dana Kukesra, modal sendiri, pengalaman usaha, dan tenaga kerja	<p>1. Sebagian besar dana Kukesra yang dikucurkan oleh pemerintah dimanfaatkan untuk usaha ekonomi produktif.</p> <p>2. Bahwa variabel dana Kukesra, modal sendiri, pengalaman usaha dan tenaga kerja baik secara individual maupun bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha.</p>
2.	Pendampingan Perempuan Pedagang Pasar Tradisional Melalui Kredit Mikro (Studi Kasus Koperasi Bagor Semarang) Piet Budiono, 2005	Mengetahui ada tidaknya perbedaan pengeluaran konsumsi, pengeluaran biaya pendidikan, pendapatan usaha, keuntungan usaha, tingkat kemandirian, serta jumlah simpanan sebelum dan sesudah pinjaman kredit.	Menggunakan Quasi Experimental dengan teknik Control Group. Analisis menggunakan statistik non parametrik	Program pendampingan berhasil meningkatkan kualitas gizi keluarga melalui penambahan pengeluaran untuk biaya konsumsi makanan dan meningkatkan pendapatan usaha, keuntungan, kemandirian bakul melalui kepercayaan diri, ketrampilan

				mengelola usaha dan keyakinan sukses dalam berusaha. Dengan meningkatnya perilaku menabung dan tersedianya akumulasi jumlah simpanan sehingga ketersediaan modal kerja lebih tercukupi.
3.	Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program P2KP di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2000-2003), Dwi Prawani Sri Rejeki, 2006	Menganalisis pemanfaatan dana pinjaman dan pendampingan teknis program P2KP di wilayah Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera.	Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi dan uji beda dengan variabel dependen pendapatan usaha dan simpanan usaha, sedangkan variabel independennya pendampingan dan pinjaman modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faskel dalam melaksanakan tugas kegiatan pendampingan efektif, yang berarti kegiatan pendampingan yang telah dilakukan oleh Faskel dapat meningkatkan usaha peserta program P2KP .</li> <li>2. Ada hubungan positif antara pendampingan dengan pendapatan usaha</li> <li>3. Ada hubungan positif antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha</li> <li>4. Ada hubungan positif antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha</li> <li>5. Ada hubungan positif antara pendampingan dengan simpanan usaha</li> <li>6. Ada hubungan positif antara</li> </ol>

				<p>pinjaman modal dengan simpanan usaha</p> <p>7. Telah terjadi peningkatan (dalam kurun waktu 6 bulan sebelum dan sesudah program) pendapatan usaha dari rata - rata per bulan</p> <p>8. Telah terjadi peningkatan simpanan usaha dari rata - rata per bulan</p>
4.	<p>Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Studi Kasus di Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Semarang Tahun 2003-2005), Niken Setyaningsih, 2007</p>	<p>Mendeskripsikan dan menganalisis tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil kemiskinan di kelurahan Pudak Payung</li> <li>2. Implementasi program pengentasan kemiskinan di kelurahan Pudak Payung</li> <li>3. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan di kelurahan Pudak Payung</li> </ol>	<p>Analisis yang digunakan adalah deskriptif persentase, yaitu membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu yang dilengkapi dengan penggambaran secara persentase atau tabel.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil keluarga miskin di kelurahan Pudak Payung menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga miskin bekerja sebagai pedagang dengan tingkat pendidikan tamat SD.</li> <li>2. Implementasi P2KP di kelurahan Pudak Payung berjalan lancar dengan jumlah KSM semakin bertambah.</li> <li>3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan Pudak Payung yaitu masih adanya sumber daya manusia BKM yang dirasa kurang memadai dan KSM yang bermaslah (kredit macet).</li> </ol>

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang diterapkan serta berdasarkan kiblat teoritis, maka perlu terlebih dahulu disusun kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini menganalisis program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, dimana sasaran akhir dari program adalah menjadikan peserta program untuk dapat mandiri dalam permodalannya sehingga dapat memutus lingkaran setan kemiskinan.

Dalam penelitian ini akan membandingkan pendapatan usaha, tabungan, dan investasi usaha sebelum dan sesudah pinjaman. Apabila ada peningkatan berarti penerima program dapat memanfaatkan bantuan program dengan baik dalam meningkatkan usahanya, sehingga nantinya apabila sudah keluar dari program akan dapat berusaha sendiri. Bantuan program yang diberikan tersebut berupa pinjaman modal kerja bergulir sebagai modal bagi peningkatan pendapatan kegiatan usaha ekonomi produktif. Kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
**KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**



## 2.2 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, disusun hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Ada beda pendapatan usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

H<sub>2</sub> : Ada beda tabungan anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

H<sub>3</sub> : Ada beda investasi usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur suatu variabel yang akan digunakan. Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman bergulir, yaitu pinjaman modal yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif anggota KSM. Besarnya pinjaman untuk satu anggota KSM mulai dari Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- tergantung jenis usaha dan lamanya menjadi anggota, dengan bunga 1,5 persen per bulan yang diangsur selama 10 bulan. Dana pinjaman diukur dengan informasi, jumlah pinjaman, kemudahan, angsuran, bunga, dan manfaat.
2. Pendapatan usaha, yaitu jumlah rupiah yang diterima dari hasil penjualan barang dagangan selama satu bulan dikurangi total biaya usaha selama satu bulan.
3. Tabungan, yaitu jumlah rupiah yang dihimpun secara rutin tiap hari atau tiap minggu oleh anggota KSM yang dihitung selama satu bulan sebagai simpanan untuk kebutuhan non usaha di masa mendatang.
4. Investasi usaha, yaitu jumlah rupiah yang dihimpun secara rutin tiap hari atau tiap minggu oleh anggota KSM yang dihitung selama satu bulan sebagai sumber modal usaha selanjutnya.

## **3.2 Populasi dan Sampel**

### **3.2.1 Populasi**

Sugiyono (2004) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Menurut Nazir (1988) dalam Mussawir (2009) populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi *finit* sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap, ataupun jumlahnya tidak terhingga disebut populasi *infinit*. Atas pemahaman tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah populasi *finit*. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Ekonomi di kelurahan Kemijen yang berjumlah 64 orang.

### **3.2.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Sugiono (2004). Mengingat bahwa populasi dalam penelitian ini tidak seluruhnya menggunakan dana pinjaman bergulir untuk kegiatan ekonomi produktif, maka penelitian ini dilakukan dengan memilih sampel yaitu anggota KSM yang mendapat pinjaman dan masih aktif dalam keanggotaan KSM periode 2008 sampai 2010 serta menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan ekonomi produktif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kemijen Mandiri terdapat 42 anggota KSM pada periode tersebut yang masih aktif dan masih tinggal di Kelurahan Kemijen serta menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan ekonomi produktif.

Prosedur penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan tujuan agar dapat diperoleh sampel yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria sampel adalah sebagai berikut:

- a. Anggota KSM yang masih terdaftar dan masih bertempat tinggal di kelurahan Kemijen dalam program pinjaman dana PNPM Mandiri Perkotaan periode tahun 2008 sampai 2010.
- b. Anggota KSM yang menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan ekonomi produktif.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Menurut Supranto (2000), sumber data yang diperoleh dalam penelitian yaitu : a) Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari obyeknya. b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer berupa data langsung dari wawancara yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan (kuesioner).
2. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Bappeda Kota Semarang, Bapermas Kota Semarang, Kantor Kecamatan Semarang Timur, Kantor Kelurahan Kemijen, BKM Kemijen Mandiri.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Data mempunyai sifat memberikan gambaran tentang suatu masalah atau persoalan. Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan metode pengumpulan data :

1. Kuesioner

Kuesioner yaitu suatu daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner merupakan hal yang pokok untuk mengumpulkan data. Hasil kuesioner tersebut akan terjelma dalam angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data berupa informasi tentang BKM dan KSM di kelurahan Kemijen.

3. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan. Wawancara merupakan bagian dari teknik komunikasi dimana pencari data mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk menggali data yang diperlukan.

4. Observasi

Observasi yaitu peneliti mengadakan penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap segala fenomena yang ada hubungannya dengan kemiskinan dan kemudian dicatat guna melengkapi data yang diperoleh.

### **3.5 Metode Analisis**

#### **3.5.1 Skala Pengukuran**

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Menurut Sugiyono (2004), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.

Dengan skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata dan untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban itu diberi skor. Dalam skala Likert disebutkan semakin tinggi skor atau nilai yang diperoleh, maka individu tersebut mempunyai sikap yang positif atau mendukung dan sebaliknya semakin rendah skor atau nilai yang diperoleh, maka individu tersebut mempunyai sikap yang negatif atau tidak mendukung.

Setiap variabel diukur rentang skalanya dimana setiap item pertanyaan menggunakan skala jenjang, yaitu:

- a. Kategori untuk jawaban sangat tinggi diberi skor 5
- b. Kategori untuk jawaban tinggi diberi skor 4
- c. Kategori untuk jawaban cukup tinggi diberi skor 3
- d. Kategori untuk jawaban rendah diberi skor 2
- e. Kategori untuk jawaban sangat rendah diberi skor 1

### 3.5.2 Teknik Analisis Data

#### 3.5.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

##### 1. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Validitas mengandung pengertian sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dipakai untuk melakukan pengukuran. Dalam penentuan validitas ada 3 hal penting yang harus dipenuhi, yaitu kriteria pengukuran harus relevan, isi pengukuran harus relevan, dan cara pengukuran harus relevan.

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menguji tiap faktor yang dibentuk oleh instrumen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis faktor yang terdapat dalam program *SPSS for Windows*. Analisis faktor ini digunakan karena merupakan analisis statistik yang mampu menggambarkan hubungan antar variabel yang terdapat dalam setiap faktor dalam setiap variabel.

Kriteria penentu suatu item memiliki validitas yang baik apabila : (1) muatan faktor  $> 0,71$  (varian 50%) tergolong sangat baik; (2) muatan faktor  $> 0,63$  (varian 40%) tergolong baik; (3) muatan faktor  $> 0,55$  (varian 30%) tergolong cukup; (4) muatan faktor  $> 0,43$  (varian 20%) tergolong sedang; (5) muatan faktor  $> 0,32$  (varian 10%) tergolong kurang baik.

Sejalan dengan pendapat di atas, Comrey (Tirka, 1994) menyatakan kriteria untuk memasukkan suatu butir ke dalam suatu faktor ditentukan secara albinary dengan persyaratan:

- Muatan faktor minimal 0,320
- Muatan faktor tidak ambigu, artinya butir tertentu tidak mempunyai unsur muatan faktor ganda

Mengacu pada kriteria di atas, maka dalam analisis faktor ini penentuan validitas suatu butir pada faktor tertentu, dengan mempertimbangkan secara seksama terutama keberadaan butir pada dimensi tertentu. Pemilihan ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan validitas yang dimiliki oleh butir tersebut setidaknya tidaknya termasuk kelompok sedang (yaitu 0,320). Hal ini tentunya akan memberikan tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Uji Reliabilitas Instrumen Variabel**

Uji coba reliabilitas instrumen dalam suatu penelitian perlu dilakukan, karena keterandalan instrumen berkaitan dengan keajekan dan taraf kepercayaan terhadap instrumen penelitian tersebut. Menurut Tukman (dalam Dwi, 2006) menguji keterandalan alat ukur sama dengan menguji taraf konsistensinya. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil (Imam Ghazali, 2001).

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran dalam hal ini dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$  (Nunnally, 1967 dalam Imam Ghazali, 2001).

### 3.5.2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas sebaran data setiap variabel dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan program SPSS versi 16. Penentuan normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu :

$H_0$  = data terdistribusi normal

$H_a$  = data tidak terdistribusi secara normal

Jika probabilitas signifikansi ( $\alpha$ ) > 0,05 maka hipotesis  $H_0$  diterima, jika probabilitas signifikansi ( $\alpha$ )  $\leq$  0,05 maka  $H_a$  diterima (Imam Ghazali, 2001).

### 3.4.2.3 Analisis Data

#### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang mencoba untuk menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna (Mudrajad, 2004).

Agar data yang diperoleh dapat diolah dengan menggunakan analisis kuantitatif, maka jawaban responden dalam kuesioner yang tersedia (5 pilihan) diberi skala interval dengan nilai 5 untuk jawaban e, 4 untuk jawaban d, 3 untuk jawaban c, 2 untuk jawaban b, dan 1 untuk jawaban a. Selanjutnya untuk memberikan deskripsi data tersebut masing-masing variabel dibuat kategori. Adapun kategori tersebut dapat diketahui dengan cara menentukan nilai skor tertinggi dan skor terendah masing-masing variabel. Apabila disusun secara matematis dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor yang dicapai (s)}}{\text{Skor yang diharapkan (pxsxq)}} \times 100\%$$

Dari variabel pinjaman bergulir terdiri dari 6 item dapat dikelompokkan dalam kategori sangat membantu, membantu, cukup membantu, kurang membantu, dan tidak membantu. Variabel pendapatan usaha terdiri dari 4 item dapat dikelompokkan dalam kategori sangat meningkat, meningkat, cukup meningkat, kurang meningkat, dan tidak meningkat. Variabel tabungan terdiri dari 2 item dapat dikelompokkan dalam kategori sangat meningkat, cukup meningkat, kurang meningkat, dan tidak meningkat. Variabel investasi usaha terdiri dari 2 item dapat dikelompokkan dalam kategori sangat meningkat, cukup meningkat, kurang meningkat, dan tidak meningkat.

## **2. Analisis Kuantitatif**

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan uji statistik pangkat tanda Wilcoxon. Menurut Supranto (2001), uji statistik pangkat tanda Wilcoxon termasuk jenis statistik non parametrik, dipakai apabila peneliti tidak mengetahui karakteristik kelompok item yang menjadi sumber sampelnya. Metode ini dapat diterapkan terhadap data yang diukur secara ordinal dan dalam kasus tertentu dengan skala nominal. Pengujian non parametrik bermanfaat untuk digunakan apabila sampelnya kecil dan lebih mudah dihitung daripada metode parametrik, kesimpulan dapat ditarik tanpa memperhatikan bentuk distribusi populasi (statistik yang bebas distribusi).

Uji pangkat tanda Wilcoxon digunakan sebagai uji beda dengan alasan data yang diteliti berasal dari sejumlah responden yang sama dan berkaitan dengan periode waktu pengamatan yang berbeda (sebelum dan sesudah program

pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan). Diantara periode pengamatan tersebut telah dilakukan pinjaman dana yaitu pemberian pinjaman modal kerja disertai intervensi pelatihan dan konsultasi usaha.

Dengan uji tanda Wilcoxon, dalam penelitian ini akan menguji apakah ada perbedaan nyata (ada peningkatan) pada variabel-variabel yang diamati pada waktu awal periode pengamatan dan pada akhir periode waktu pengamatan.

Adapun variabel yang diamati dan diuji adalah jumlah pendapatan usaha, jumlah tabungan, dan jumlah investasi usaha. Setelah uji tanda Wilcoxon dilakukan akan muncul nilai  $z$  dan nilai probabilitas ( $p$ ). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

$H_0$  = tidak ada beda variabel yang diuji antara sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir

$H_1$  = ada beda variabel yang diuji antara sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir

Jika probabilita ( $p$ )  $> 0,05$  maka hipotesis  $H_0$  diterima, jika probabilita ( $p$ )  $\leq 0,05$  maka hipotesis  $H_0$  ditolak.